

# BAB I

## PENDAHULUAN

### **A. Latar Belakang**

Dalam rangka pembangunan ekonomi, perlu adanya dukungan dari beberapa pihak termasuk lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan bukan bank. Perbankan mempunyai peran penting dalam meningkatkan perekonomian di Indonesia. Bank merupakan lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara dan menyalurkan dana yang telah dipercaya masyarakat dalam bentuk tabungan, giro dan deposito. Bank juga berperan menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman atau kredit. Peranan bank generik sangat strategis untuk menjembatani kebutuhan kapital antar pemilik dana dan pinjaman dana.

Bank merupakan lembaga keuangan yang berfungsi perantara antar pihak yang kelebihan dana (*surplus unit*) dengan pihak yang kekurangan dana (*deficit unit*). Melalui bank yang kelebihan dana ini maka, dana tersebut disalurkan kepada pihak-pihak yang memerlukan dana dan akan memberikan manfaat bagi kedua belah pihak (Pratama, 2010). Seperti yang telah tertera juga di dalam Undang-Undang No.10 tahun 1998 tentang perbankan, hal tersebut dapat disimpulkan bahwa bank dapat berperan sebagai perantara keuangan dengan melakukan penghimpunan dana dari masyarakat yang kelebihan dana dalam berbagai bentuk simpanan. Kemudian bank akan membayar bunga kepada nasabahnya dan menyalurkan dana kepada masyarakat yang kekurangan dana dalam bentuk kredit.

Kredit adalah peminjaman uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah

jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan, atau pembagian hasil keuntungan. (Standar Akuntansi Keuangan, 2009). Dengan hal tersebut, pihak bank akan berupaya memaksimalkan potensi dari dana yang berhasil dihimpun dari masyarakat dengan menyalurkannya dalam bentuk kredit yang akan menjadikannya salah satu sumber penghasilan bagi bank.

Dana pihak ketiga memberikan peranan penting dalam menggerakkan sektor perekonomian. Hampir dari 95% dana pihak ketiga perbankan nasional pada Bank Umum. Dana pihak ketiga menjadi faktor yang mempengaruhi dalam penyaluran kredit, yang mana hal ini digunakan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi (Yuwono, 2012). Dana pihak ketiga merupakan perilaku penawaran kredit dalam perbankan bukan hanya dipengaruhi dari dana pihak ketiga melainkan juga bisa dipengaruhi oleh faktor internal seperti *Loan to Deposit Ratio* (LDR) untuk melihat seberapa besar tingkat likuiditas dalam menentukan kemampuan untuk membayar kewajiban jangka pendek (Yuwono, 2012). *Loan to deposit ratio* juga berkaitan dengan penyaluran kredit, sebab dari kegiatan inilah bank dapat memenuhi kewajiban jangka pendek, membayar kembali semua deposit yang mengambil uang sewaktu-waktu, serta memenuhi permintaan kredit yang telah diajukan.

Dalam perbankan pemberian kredit yang dilakukan oleh bank kepada masyarakat yang dapat mengandung resiko berupa kredit macet atau tidak lancarnya pembayaran yang dapat mempengaruhi kinerja bank. Besarnya *non performing loan* (NPL) sudah ditentukan Bank Indonesia sebesar 5%. Nilai NPL yang tinggi akan mempengaruhi dana yang disalurkan melalui kredit juga akan

berkurang karena bank harus membentuk cadangan penghapusan yang lebih besar (Meydinawathi, 2017).

Guna untuk memperlancar kegiatan operasional bank, maka sangat penting memiliki modal yang cukup. Permodalan atau yang sering menggunakan rasio *Capital Adequancy Ratio* (CAR) merupakan rasio kinerja bank yang digunakan untuk mengukur kecukupan suatu modal yang dimiliki bank untuk menjaga aktiva (Dendiwijaya, 2013). Tingkat profitabilitas juga harus menjadi perhatian bank, mengingat bagaimana bank tersebut harus mampu mengoptimalkan aktiva yang dimiliki agar mampu menghasilkan keuntungan. Kaitanya dengan mengukur tingkat profitabilitas dapat menggunakan rasio *Return On Assets* atau ROA.

Efisiensi kinerja operasional juga berpengaruh. Dimana tingkat operasional diukur menggunakan beban operasional terhadap pendapatan operasional atau bisa disingkat BOPO. Terkait dengan kegiatan utama bank dalam penyaluran kredit kepana nasabah. Dalam rasio ini akan dibandingkan antara biaya operasional dengan pendapatan operasionalnya, semakin kecil rasio ini maka semakin efisien dalam mengeluarkan biaya guna mendapatkan pendapatan. Dalam dunia perbankan kegiatannya terfokus pada penghimpunan dana pihak ketiga, maka biaya yang banyak dikelurakan guna untuk membayar bunga kepada deposan, sedangkan pendapatan itu sendiri dari hasil pendapatan bunga yang berasal dari kredit (Yulhasnita, 2013).

Dalam kaitanya dengan pertumbuhan ekonomi suatu negara, penyaluran kredit memiliki peranan yang sangat penting. Tetapi di Indonesia kredit yang disalurkan

oleh perusahaan perbankan belum optimal, hal tersebut dapat dilihat dari rasio *loan to deposit ratio* Bank Umum pada periode 2017-2021 (Otoritas Jasa Keuangan)

Table 1.1

Gambaran loan to deposit ratio periode 2017-2021 (per desember)

(Juta Rupiah)

Tahun	2017	2018	2019	2020	2021
Kredit	4.548.155	5.092.584	5.391.846	5.235.027	5.512.366
LDR	90,04%	93,71%	94,43%	82,54%	73,67%

Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia, angka *loan to deposit ratio* yang dimiliki perbankan berharap pada kisaran 85-90%, jika mencapai angka 100% maka berada dalam keadaan finansial yang baik untuk menghadapi kondisi tak terduga. Namun di tahun 2020 dan tahun 2021 mengalami penurunan pada angka 82 % dan 73%. Hal tersebut bisa disebabkan karena menurunnya kualitas suatu bank dalam mempertahankan nasabah atau juga bisa disebabkan terjadinya krisis ekonomi, para nasabah banyak mengambil atau meminjam kredit pada bank guna untuk memenuhi kebutuhan selama terjadi krisis. Sehingga asset pada bank akan menurun seiring dengan penurunan pendapatan nasabah.

Penyaluran kredit, khususnya kredit investasi, diharapkan dapat menggerakkan kembali sektor riil sehingga tercipta kesempatan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi serta menjaga kestabilan ekonomi secara makro. Hal ini dapat berarti bahwa pertumbuhan ekonomi lebih efektif jika didorong oleh investasi sehingga sangat diperlukan kebijakan pemerintah yang lebih mengarah pada faktor stimulan pertumbuhan ekonomi melalui fasilitas kredit. Bank-bank

milik pemerintah seharusnya menjadi pionir dalam memulihkan kembali fungsi intermediasi bank untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penyaluran kredit produktif. Bank milik pemerintah diharapkan tidak hanya menerima dana masyarakat kemudian menyalurkannya ke pasar finansial, misalnya suku bunga kredit, suku bunga SBI dan obligasi pemerintah untuk mendapatkan margin (keuntungan) tanpa harus bekerja keras dan tanpa perasaan bersalah melihat tidak bergairahnya sektor riil. Selain berorientasi profit, bank milik pemerintah juga berfungsi sebagai agen pembangunan nasional. Agen pembangunan yang dimiliki kepada bank milik pemerintah tidak dapat dilakukan bank swasta.

Pemerintah yang mempunyai kendali terhadap bank-bank tersebut memiliki kewenangan penuh untuk mendorong bank-bank tersebut menyalurkan kredit produktif. Jika saat ini bank-bank milik pemerintah masih terfokus pada kredit konsumsi, seharusnya pemerintah melalui BI membatasinya dan meminta bank tersebut meningkatkan penyaluran kredit ke sektor produktif. Bahkan, jika perlu dengan peraturan atau kebijakan, tidak sekadar imbauan (*moral suasion*). Namun, bank milik pemerintah tidak boleh meninggalkan *prudential banking* dan harus mengikuti semua regulasi serta memperhatikan faktor-faktor tertentu dalam menyalurkan kreditnya agar tidak berdampak negatif di kemudian hari dan agar dapat menjamin tercapainya tujuan dan prinsip perbankan yaitu *profitabilitas* (mendapat keuntungan) dan *safety* (keamanan) dari kredit yang diberikan

Dari latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang penyaluran kredit yang ditinjau dari faktor-faktor yang mempengaruhi penyaluran kredit (DPK, NPL, CAR, suku bunga kredit, suku bunga SBI) pada bank

umum konvensional yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan dalam bentuk skripsi dengan judul **“Analisis Fakto-Faktor Yang Mempengaruhi Jumlah Penyaluran Kredit pada Bank Umum di Indonesia Tahun 2018-2021”**

## **B. Perumusan Masalah**

Perumusan masalah pada penelitian ini yaitu:

Adapun penulis menuliskan perumusan masalah dengan “Bagaimana pengaruh DPK, NPL, CAR, suku bunga kredit, suku bunga SBI terhadap Jumlah Penyaluran Kredit pada Bank Umum di Indonesia Tahun 2018-2021 ?”

## **C. Batasan Masalah**

Untuk fokus pada penelitian ini dan tidak memperluas, maka penulis membatasi pada faktor-faktor yang mempengaruhi penyaluran kredit. Selain itu terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah kredit yaitu jumlah dana, dana pihak ketiga, *loan to deposit ratio*, *non performing loan*, *capital adequacy ratio*, biaya operasional terhadap pembiayaan operasional, *return to equity ratio*, *return on asset*, inflasi, surat berharga pada bank, suku bunga. Oleh karena itu peneliti membatasi dan terfokus pada penyaluran kredit, DPK, suku bunga kredit, suku bunga SBI, CAR dan NPL.

## **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang akan dicapai dalam penelitian ini “Untuk mengidentifikasi pengaruh DPK, suku bunga

kredit, suku bunga SBI, CAR dan NPL terhadap jumlah penyaluran kredit pada Bank Umum Konvensional di Indonesia tahun 2018-2021”

#### **E. Manfaat Penelitian**

##### 1. Bagi Instansi terkait

Penelitian dapat dipergunakan dalam menentukan, merumuskan serta mengevaluasi kebijakan-kebijakan terutama pada pengaruh DPK, suku bunga kredit, suku bunga SBI, CAR dan NPL terhadap jumlah penyaluran kredit pada Bank Umum Konvensional di Indonesia tahun 2018-2021.

##### 2. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya untuk menganalisis faktor-faktor yang dapat mempengaruhi jumlah penyaluran kredit pada Bank Umum Konvensional di Indonesia.

